

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMENRINTAH (LKIP)
DINAS SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDUNG
TAHUN 2019**



KOTA BANDUNG

**DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2020**

Jl. Babakan Karet Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan tersebut Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung yang sebelumnya berbentuk Kantor Sosial sebagai Lembaga Teknis Daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Struktur organisasi pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung saat ini sebanyak 51 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Struktur dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berdasarkan Jabatan Struktural

NO	SKPD	Eselon			Fungsional	Pelaksana				Jumlah
		II	III	IV		IV	III	II	I	
1.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	1	5	17	-	-	25	-	-	48

C. Tugas dan Fungsi

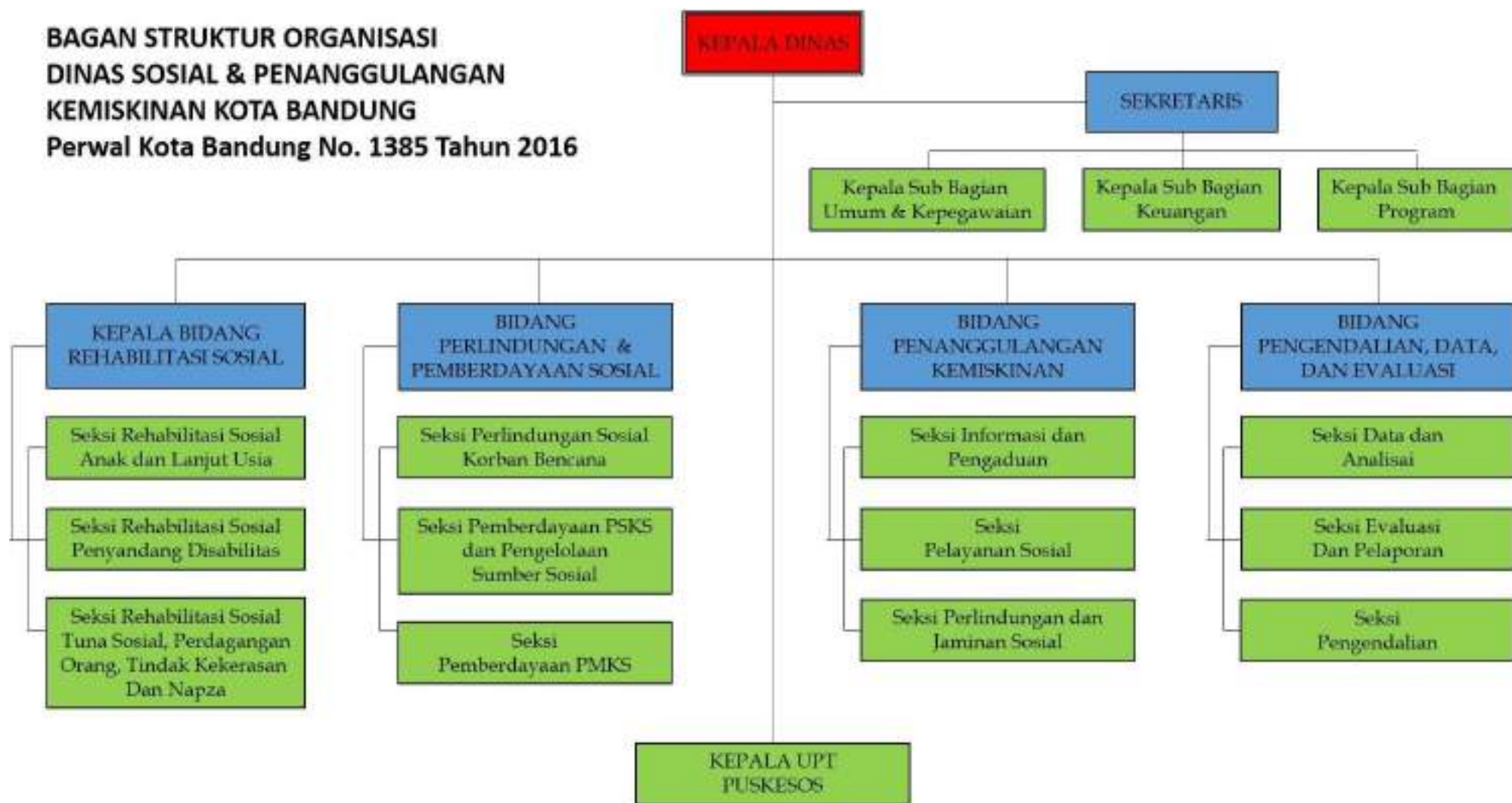
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

- bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Dr. TONO RUSDIANTONO H., M.Si. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung



D. Isu Strategis

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama permasalahan PMKS Jalanan.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial yang jumlah sangat besar di Kota Bandung.

Tabel 1.3**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Bandung**

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah (2015)	Jumlah (2017)	Jumlah (2018)
1	Anak Balita Terlantar	orang	354	177	132
2	Anak Terlantar	orang	2.412	592	408
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	orang	57	28	24
4	Anak Jalanan	orang	2.162	172	117
5	Penyandang Disabilitas Anak	orang	1.060	1.506	1262
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	orang	151	105	61
7	Lanjut Usia Terlantar	orang	2.108	2.287	4299
8	Penyandang Disabilitas	orang	5.069	4.123	3707
9	Tuna Susila	orang	319	69	60
10	Gelandangan	orang	746	42	27
11	Pengemis	orang	372	86	61
12	Pemulung	orang	388	610	332
13	Kelompok Minoritas	orang	153	83	57
14	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	orang	153	315	214
15	Orang dengan HIV/Aids	orang	2.690	82	40
16	Korban penyalahgunaan Napza	orang	103	182	121
17	Pekerja migran bermasalah sosial	orang	17	3	1
18	Korban bencana alam	orang	-	71	69
19	Korban bencana sosial	orang	-	9	7
20	Perempuan rawan sosial ekonomi	orang		3.487	6759
21	Keluarga Miskin	KK	117.234	61.467	72.477
22	Keluarga bermasalah psikologis	KK	2.603	86	144
23	Keluarga berumah tidak layak huni	KK	3.606	-	-

**data pada tahun 2018*

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019 yakni :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, landasan hukum penyusunan LKIP dan pelayanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung serta sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan tentang perencanaan strategis pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebelum dan setelah hasil Reviu dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), skala pengukur yang digunakan, serta metode evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan rangkuman dan kesimpulan atas berbagai capaian kinerja pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 460/002.I/Dinsosnangkis Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut dilaksanakan melalui salah satu Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut :

“Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi tersebut sebanyak tiga sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup PMKS dan Penduduk Miskin	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	70	50	55	60	65
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga miskin	Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	50	52	55	57	60
		Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80	85	90	95	100

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 625 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Tingkat Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh layanan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial dibagi jumlah PMKS yang ada dikali 100%	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah memperoleh bantuan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga miskin	Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	Amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 serta Indikator Sasaran pada Misi 3 RPJMD	Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuansosial dibagi populasi fakir miskin dikali 100%	Fakir Miskin yang telah memperoleh pemenuhan sebagian kebutuhan dasar baik pangan, dan sandang
3	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	Sesuai dengan Misi 5 RPJMD	Jumlah PSKS yang aktif menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikali 100%	PSKS yang aktif menyampaikan laporan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan kesejahteraan secara berkala/rutin

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan

lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	50
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga miskin	Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	44.92
3	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70

3.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil revidi pada rencana strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil revidi selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama permasalahan PMKS Jalanan.

3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial yang jumlah sangat besar di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup PMKS dan Penduduk Miskin	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	70	50	55	60	65
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga miskin	Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	50	52	55	57	60
		Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	80	85	90	95	100

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Dan Penanggulangan

Kemiskinan hasil revidu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas Sosial
Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	70%	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Tingkat Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh layanan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial dibagi jumlah PMKS yang ada dikali 100%		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah memperoleh bantuan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga miskin	Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	50%	Amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 serta Indikator Sasaran pada Misi 3 RPJMD	Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuansosial dibagi populasi fakir miskin dikali 100%		Fakir Miskin yang telah memperoleh pemenuhan sebagian kebutuhan dasar baik pangan, dan sandang
3	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80%	Sesuai dengan Misi 5 RPJMD	Jumlah PSKS yang aktif menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikali 100%		PSKS yang aktif menyampaikan laporan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan kesejahteraan secara berkala/rutin

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	70
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga miskin	Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	50
3	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran

ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan
Kota Bandung Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas

Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Nomor : 010/kep.496/Dinsosnangkis tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- c. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1**Capaian Indikator Kinerja Utama****Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun
2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	70	84.61	120.87
2	Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	50	78.16	156.32
3	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	80	80.77	100.96

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya, dengan capaian kinerja 120.87 %, pada indikator Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya, dengan capaian kinerja 156.32 %, pada indikator Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan capaian kinerja 100.96 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan

sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja
Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	70	84.61	120.87
2	Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	50	78.16	156.32
3	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	80	80.77	100.96

Gambar 3.1 Grafik Capaian IKU 2019



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 3	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	34%	48.85%	122.12	70	84.61	120.87

Sasaran meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini memiliki satu indikator yaitu jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani, dimana dalam menilai indikator tersebut kriteria yang digunakan ialah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial, pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Sampai dengan triwulan ke-4 pada tahun 2019 terdapat 63.726 orang PMKS yang ditangani, baik itu melalui program pelatihan keterampilan, pemberian bantuan usaha, rehabilitasi sosial, penjangkauan PMKS, pemberian bantuan di bidang pelayanan kesehatan seperti pemberian KIS dan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan PMKS serta pelayanan pendidikan bagi anak sekolah yang termasuk dalam database kemiskinan Kota Bandung. Adapun populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung berdasarkan data perencanaan pada desil 1 dan desil 2 serta korban bencana alam/sosial pada Tahun 2019 sebanyak 75.315 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7

Jumlah PMKS yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Klien UPT PUSKESOS yang memperoleh layanan	Orang	2.838
2	Korban Bencana yang memperoleh bantuan tanggap darurat	Orang	2.608
3	Orang Terlantar dalam perjalanan yang dikembalikan ke daerah asal	Orang	495
4	Warga Miskin yang memperoleh pemberdayaan ekonomi	Orang	200
5	Keluarga Miskin yang memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai dan PKH	Keluarga	54.308
6	PMKS yang memperoleh pemberdayaan	Orang	177
7	Bantuan Nutrisi Bagi Lansia	Orang	500
8	Bantuan Nutrisi Bagi Anak	Orang	312
9	Warga miskin yang memperoleh layanan akses pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	930
10	Gepeng	Orang	120
11	ODHA	Orang	80
12	Disabilitas	Orang	1.158
JUMLAH PMKS			63.726

Gambar 3.1

Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan dasar



Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya" adalah sebesar 84.61 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 120.87 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya" tahun ini adalah sebesar 120.87 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan maka capaian kinerjanya mencapai 76.82 %.

Sasaran 2
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga miskin

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8**Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga miskin**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	50%	77.56%	155.12	50	78.16	156.32

Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga miskin dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu prosentase warga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya, kriteria yang digunakan ialah jumlah jumlah warga miskin yang memperoleh pelayanan atau bantuan pangan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan pelatihan keterampilan usaha.

Selama tahun 2019 cukup banyak program dan kegiatan yang diluncurkan baik dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Sosial RI guna mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Bandung. Capaian untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin ini sampai dengan Triwulan ke 4 Tahun 2019 mencapai 150.51% , dimana pada Tahun 2019 sebanyak 56.646 warga miskin yang telah terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya pada bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan sektor dasar lainnya dari jumlah keluarga miskin yang ada di Kota Bandung berdasarkan hasil

validasi data BDT Tahun 2019 Desil 1 dan Desil 2 sebanyak 72.477 keluarga, dengan rincian bantuan sebagai berikut :

Tabel. 3.9**Jumlah fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Keluarga Miskin yang memperoleh BPNT dan PKH	Keluarga	54.308
2	Keluarga miskin yang memperoleh bantuan Lainnya	Keluarga	2.339
JUMLAH WARMIS			56.646

Gambar 3.2 Bantuan Bagi Warga Miskin



Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, salah satu program pemerintah pusat yang berada di bawah koordinasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan yang merupakan bantuan keuangan bersyarat dari pemerintah yang diberikan langsung kepada masyarakat melalui bank penyalur. Jumlah penerima Program Keluarga Harapan di Kota Bandung Tahun 2019 sebanyak 35.764 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Adapun skema bantuan Program Keluarga Harapan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Skema Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Skenario Bantuan	Besar Bantuan Per RTSM/Bulan
1.	Bantuan Tetap	Rp. 500.000,-
2.	Bantuan bagi RTSM yang memiliki : Anak dibawah usia 6 Th, Ibu hamil/Menyusui	Rp. 1.200.000,-
3.	Anak Peserta Pendidikan Setara SD/MI	Rp. 450.000,-
4.	Anak Peserta Pendidikan Setara SMP/MTs	Rp. 750.000,-
5.	Anak Peserta Pendidikan Setara SMA/MA	Rp. 1.000.000,-
6.	Bantuan Penyandang Disabilitas Berat	Rp. 3.100.000,-
7.	Bantuan lanjut Usia 70 tahun Keatas	Rp. 1.900.000,-

Adapun kewajiban/persyaratan bagi peserta PKH selama menerima program sebagai berikut :

1. Protokol kesehatan bagi peserta PKH yang memiliki anak usia 0-6 tahun
2. Anak usia 0-11 bulan harus mendapatkan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus;
3. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 bulan;
4. Anak usia 5-6 thn ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PPAUD

1. Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH (Ibu Hamil dan Ibu Nifas) yaitu

:

- o Selama Kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 3 kali dan mendapatkan suplemen tablet Fe;
- o Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan;
- o Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi berumur 28

2. Kewajiban peserta PKH dalam bidang pendidikan sebagai berikut :

RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15 thn. Peserta PKH ini diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTs (termasuk SMP/MTs Terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas min. 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung

Kewajiban Penyandang Disabilitas Berat:

- o Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
- o Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*)

Jika dalam RTSM terdapat anak usia 15 sampai 18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta RTSM tersebut dapat menjadi peserta PKH apabila anak tersebut didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil pendidikan kesetaraan (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, atau Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Thn).

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya" adalah sebesar 78.16 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 156.32 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya" tahun ini adalah sebesar 156.32 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan maka capaian kerjanya mencapai 130.27 %.

Sasaran 3
Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	500	434	86.80	80	80.77	100.96

Sasaran Meningkatkan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan upaya-upaya kesejahteraan sosial

Capaian untuk sasaran meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial berdasarkan perhitungan di atas ialah 100.96 %, hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah berhasil mencapai target dalam mendorong partisipasi aktif dari berbagai elemen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Organisasi Sosial yang jumlah seluruh PSKS yang ada di Kota Bandung

sebanyak 987 Orang dari target 1.222 Orang. dengan rincian PSKS sebagai berikut :

Tabel 3.12

PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Jumlah Kader Penyandang Disabilitas	Orang	225
2	Jumlah SDM TAGANA	Orang	60
3	Jumlah LKS	Lks	59
4	Jumlah SDM PMKS	Orang	100
5	Pendamping PKH	Orang	147
6	Peksos	Orang	31
7	Jumlah PSKS	Orang	365
JUMLAH PMKS YANG TERLAYANI			987

Gambar 3.3

Jumlah PSKS yang berperan aktif



Dalam memformulasikan perhitungan terhadap PSKS yang aktif dilihat berdasarkan jumlah pelaporan yang masuk atau dilaporkan oleh elemen PSKS tersebut terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh PSKS yang bersangkutan di masyarakatnya. Hal ini dapat di tunjukan melalui peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan tidak termasuk kepada sasaran strategis Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, namun merupakan salahsatu sasaran yang harus dicapai oleh setiap perangkat daerah di Kota Bandung dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun indicator dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target pada **nilai 85 atau predikat sangat baik**

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik saat ini Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan reformasi Birokrasi mewajibkan setiap instansi pemerintah terutama yang melayani kepentingan publik untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang menjadi sasaran layanannya. Sebagaimana amanat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat dipergunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik. Target Indeks Kepuasan Masyarakat yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebesar 75%.

Berdasarkan Keputusan Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017 tersebut dimana unsur penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat mencakup 9 unsur, yang meliputi :

1. **Persyaratan Pelayanan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur pelayanan**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
4. **Biaya pelayanan**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. **Kompetensi Pelaksana**, Yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana Pelayanan**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan Prasarana Pelayanan**, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Beberapa pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat antara lain :

1. Pemberian rekomendasi keringanan biaya pengobatan bagi warga miskin
2. Pemberian rekomendasi keringanan biaya pendidikan di perguruan tinggi bagi warga yang kurang mampu
3. Pemberian rekomendasi bagi warga yang mengajukan permohonan proses adopsi anak
4. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Sosial
5. Penerbitan ijin penyelenggaraan pengumpulan uang/barang (sumbangan sosial)
6. Pemberian uang transport bagi orang yang terlantar dalam perjalanan dan ingin kembali ke daerah asal

Berdasarkan hasil survey kepada 150 orang pada tahun 2019 masyarakat penerima layanan yang dijadikan sampel terhadap berbagai layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait tingkat kepuasan masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.13

Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

NO.	UNSUR PELAYANAN										NILAI RATA - RATA
U1	Persyaratan										3,58
U2	Prosedur										3,83
U3	Waktu Pelayanan										3,11
U4	Biaya/Tarif										3,98
U5	Produk Layanan										3,94
U6	Kompetensi Pelaksana										3,01
U7	Perilaku Pelaksana										3,49
U8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan										3,62
U9	Sarana dan Prasarana										3,67
Σ nilai / unsur	537	574	467	597	591	452	523	543	551		
NRR / unsur	3,58	3,83	3,11	3,98	3,94	3,01	3,49	3,62	3,67		
NRR tertimbang / unsur	0,40	0,42	0,35	0,44	0,44	0,33	0,39	0,40	0,41	Nilai Indeks	3,58
IKM Unit Pelayanan Sosial Tahun 2019											89,45

Berdasarkan tabel atas penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung diperoleh Nilai Indeks sebesar **3.58**, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar $3.58 \times 25 = 89.48$

b. Mutu Pelayanan A

c. Kinerja pelayanan Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh kesimpulan bahwa kinerja pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung sudah tergolong **Sangat Baik** atau

tercapai sesuai target dimana target Nilai IKM Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada Tahun 2018 sebesar 89.45 %.

Namun demikian berdasarkan hasil survey terhadap tingkat pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung masih terdapat unsur pelayanan yang dinilai kurang baik yaitu :

1. Kompetensi Pelaksana, dikarenakan belum adanya diklat atau bimtek khusus bagi pegawai pelayanan.
2. Waktu Pelayanan, hal ini disebabkan sangat terbatasnya jumlah pegawai pada Dinas Sosial dimana rata-rata setiap seksi hanya terdiri atas 3 orang staf dan 1 orang kepala seksi, sehingga terkadang klien dilayani oleh petugas yang berada di luar tupoksinya.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial" adalah sebesar 80.77 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.96 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial" tahun ini adalah sebesar 100.96 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan maka capaian kinerjanya mencapai 80.77 %.

D. Realisasi Janji Wali Kota

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Bandung tentunya menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kota Bandung khususnya Janji Wali Kota yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 yaitu :

- Fasilitas Disabilitas di semua ruang publik

Target Janji Wali Kota ini berupa penyusunan Raperda tentang Penyandang Disabilitas, termasuk di dalamnya fasilitasi akses penyandang disabilitas di seluruh ruang publik, yang di dukung oleh program kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Adapun realisasi kegiatan berupa penetapan Perda tentang Penyandang Disabilitas dan terlaksananya pembuatan ram dan jalur kursi roda pada 8 lokasi taman (DPKP3). Secara tertulis, tidak ada target spesifik terkait fasilitas disabilitas di semua ruang publik yang diemban DPU dalam RPJMD 2019-2023.

- Kartu bandung sejahtera bagi warga tidak mampu

Target Janji Wali Kota Kartu Bandung Sejahtera bagi warga tidak mampu tahun 2019 yaitu Penyusunan Kajian dan Draft Peraturan Wali Kota Bandung tentang Mekanisme Pemberian Kartu Bandung Sejahtera melalui Program Pelayanan terpadu kemiskinan dan kegiatan peningkatan aksesibilitas fakir miskin lainnya. Adapun realisasi janji Wali Kota ini, berupa hasil kajian dan Draft Raperwal tentang Mekanisme Pemberian Kartu Bandung Sejahtera telah dilaksanakan melalui kerjasama .

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 120.87 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 156.32 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.96 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 36.667.742.381,35 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 28.761.708.063,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 7.906.034.318,-

Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran

sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 120.87%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 156.32%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.96%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 28.761.708.063 (*dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu enam puluh tiga rupiah*) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah 78.32 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 09 Maret 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDUNG**



Dr. TONO RUSDIANTONO H., M.Si.

NIP. 19651118 198603 1 005

**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MONEV TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Keuangan / Anggaran			Kinerja		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan	27.000.000	-		48 Orang	-	-
		Kegiatan rehabilitasi Sosial ODHA	78.195.250	71.506.000	91,45	80 Orang	80 Orang	100
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandang dan Pengemis	207.885.000	99.145.000	47,69	120 Orang	120 Orang	100
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	767.974.750	629.852.500	82,01	160 Kali	160 Kali	100
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana (Traumatik)	101.925.000	-	-	25 Orang	-	-
		Kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti	10.359.155.773	6.571.037.975	63,43	100%	100%	100
		Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar						
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti	860.302.400	501.236.000	58,26	312 Orang	312 Orang	100
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	822.999.350	341.820.000	41,53	500 Orang	500 Orang	100
		Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma						
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas	2.173.201.100	1.749.197.750	80,49	1000 Orang	1210 Orang	121
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial)						
		Kegiatan Pembangunan Pusat Bimbingan / Konseling bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	-	-	-	-	-	-
		Program Perlindungan Sosial Bencana						
		Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan perlengkapan kebencanaan	360.000.000	355.000.000	93,06	60 Orang	60 Orang	100
Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap, cepat darurat serta kejadian luar biasa	1.130.900.300	1.050.516.750	100,00	100%	100%	100		
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga miskin	Program Penanganan Fakir Miskin						
		Kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	1.445.522.400	1.149.534.000	79,52	139 orang	139 Org	100
		Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	617.354.428	569.034.475	92,17	300 orang miskin	240 Orang	80
		Kegiatan pelatihan keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	260.639.867	159.693.310	61,27	200 orang	200 Orang	100
		Kegiatan Pendampingan terhadap program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dan propinsi	92.382.400	81.274.000	87,98	5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Program Pemberdayaan PMKS						
		Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi PMKS	247.178.957	239.593.200		50 Orang	30 Org	60,0
		Kegiatan Peningkatan kualitas SDM tenaga pemberdayaan PMKS	851.952.200	313.128.000		130 Orang	40 Org	30,8
		Kegiatan pengembangan usaha ekonomi keluarga PMKS	687.724.818	523.199.050		151 Keluarga	147 Keluarga	97,4
		Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan						
		Pelaksanaan KIE, konseling, dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	416.125.000	286.928.150	68,95	2 Media	3 Media	100
		Kegiatan peningkatan aksesibilitas fakir miskin dan PMKS lainnya	1.077.493.190	342.481.900	31,79	100%	100%	100
		Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS						
		Kegiatan pemutakhiran data	3.850.160.000	703.723.500	18,28	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Kegiatan pengendalian, rekonsiliasi dan sinkronisasi data	220.000.000	126.240.000	84,37	12 Laporan	12 Laporan	100		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Keuangan / Anggaran			Kinerja			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	149.622.000	105.538.500	47,97	12 Laporan	12 Laporan	100	
3	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial							
		Kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	987.693.400	1.001.841.050	101,43	2675 Orang	680 Org	25,42	
		Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	512.035.500	235.298.800	45,95	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	736.218.780	709.471.288	96,37	12 laporan	100	100	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	816.540.000	794.798.500	97,34	12 laporan	100	100	
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	199.983.641	195.608.600	97,81	12 laporan	100	100	
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	333.037.650	297.860.750	89,44	12 laporan	100	100	
		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	998.403.950	998.403.950	100,00	2 Paket	100	100	
		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.928.433	69.831.900	83,20	12 laporan	100	100	
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.436.000	29.436.000	100,00	12 laporan	100	100	
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	260.370.000	222.969.300	85,64	12 laporan	100	100	
		Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	220.000.000	219.749.773	99,89	12 laporan	100	100	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	950.251.536	827.487.591	87,08	12 laporan	100	100	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	4.788.986.400	4.332.063.773	90,46	102 Org	100	100	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.499.949.372	1.346.649.000	89,78	7 laporan	7 laporan	100	
		Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2005 Manajemen Mutu	397.329.000	46.429.000	11,69	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	500.026.867	384.274.727	76,85	12 Dokumen	12 Dokumen	100	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	163.748.750	150.436.000		310 Stel	235 Stel	75,806	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
		Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	139.095.000	117.700.000	84,62	3 laporan	3 laporan	100	

Bandung, 9 Maret 2020
**KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDUNG**



Dr. TONO RUSDIANTONO H., M.Si.
NIP. 19651118 198603 1 005

MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)



PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)



PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BENCANA



PROGRAM PEMBINAAN EKS-PENYANDANG SOSIAL (EKS-NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)



PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT & EKS-TRAUMA



PROGRAM PEMBINAAN LANJUT USIA TERLANTAR



PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL



PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR WARGA MISKIN



PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI BPNT



PROGRAM PELAYANAN TERPADU KEMISKINAN



PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN



PROGRAM PELAYANAN TERPADU KEMISKINAN MELALUI KEGIATAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS FAKIR MISKIN DAN PMKS LAINNYA



PROGRAM IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI DATA PMKS



PROGRAM PELAYANAN TERPADU KEMISKINAN MELALUI RAPAT EVALUASI



PROGRAM PELAYANAN TERPADU KEMISKINAN MELALUI KEGIATAN SLRT

MENINGKATKAN PERAN AKTIF POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)



PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI HKSJ



KEGIATAN HARI PAHLAWAN NASIONAL



KEGIATAN HARI PAHLAWAN NASIONAL



KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KADER RBM



KEGIATAN PEMULIHAN NILAI-NILAI SOSIAL PSKS